



TARGET HAPUSKAN KEMISKINAN EKSTREM

Pemkot Ajak Masyarakat Ikut Saling Bersinergi

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mengajak semua pihak terkait di masyarakat untuk saling bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Yogya. Terutama menghapus kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pemerintah pusat bisa pada 2024.

Menurut Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, dalam mengatasi kemiskinan pemerintah daerah tidak bisa sendiri. Pihaknya pun telah menjangkau masuk dari masyarakat melalui musrenbang tematik yang khusus membahas masalah kemiskinan. Dirinya berharap dalam musrenbang tematik tersebut dapat menjadi titik temu berbagai pemangku kepentingan guna identifikasi permasalahan dan menanggulangi kemiskinan.

"Kami harap ada masukan-masukan dan peran dari berbagai pihak untuk memecahkan persoalan kemiskinan di Kota Yogya. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, butuh saling bersinergi dan kolaborasi," jelas Sumadi, Minggu (26/3).

Di samping itu saat ini Kota Yogya menjadi proyek percontohan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan berdasarkan surat keputusan Menteri Pen-

dayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 888 Tahun 2022. Kota Yogya juga termasuk dari 302 kabupaten/kota yang ditetapkan menjadi perluasan daerah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2022-2024. Hal itu sesuai keputusan Menko Bidang Pembangunan Nasional, dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022.

"Pemerintah pusat menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024. Ini hal yang serius dan jadi keputusan nasional dan Pemkot harus mendukung secara optimal. Jadi kita punya tugas yang cukup berat, tapi kita harus optimis bisa melaksanakannya," tambahnya.

Rencana aksi pengentasan kemiskinan di Kota Yogya juga telah dipayungi Perwal 396/2022 sebagai percepatannya.

Di samping itu telah diterbitkan dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kota

Yogya tahun 2023-2026. Terdapat enam bidang prioritas dalam dokumen tersebut yaitu konsumsi atau pengeluaran, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.

"Pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemkot juga dibatasi regulasi. Contoh dengan sumber APBD intervensi hanya dapat menasar warga KTP Yogya. Warga domisili Yogya tapi tidak memiliki KTP Yogya tidak bisa. Padahal survei BPS menasar juga warga miskin domisili di kota. Ini artinya perlu melibatkan stakeholder lain," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, mengatakan berdasarkan data BPS angka kemiskinan Kota Yogya tahun 2022 sebesar 6,62 persen. Angka tersebut turun 1,07 persen jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 7,69 persen. Kemudian yang masuk dalam sasaran penanggulangan kemiskinan sebanyak 49.121 jiwa atau 17.452 kepala keluarga (KK) yang didalamnya

termasuk sasaran kemiskinan ekstrem sebanyak 13.151 jiwa atau 3.674

KK. Sasaran itu mengacu pada data penduduk dan keluarga sasaran jamin-

an perlindungan sosial Kota Yogya tahun 2022 dan penyandingan data

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005